

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR)**

Sejarah Partai Golongan Karya (GOLKAR) bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama (SEKBER) GOLKAR di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. SEKBER GOLKAR didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (SEKBER GOLKAR).

SEKBER GOLKAR didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. SEKBER GOLKAR ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. SEKBER GOLKAR ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama SEKBER GOLKAR adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965.

Jumlah anggota SEKBER GOLKAR ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota SEKBER GOLKAR dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional SEKBER GOLKAR adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam SEKBER GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaanannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ke- 7 (tujuh) KINO yang merupakan kekuatan inti dari SEKBER GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, SEKBER GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang.

Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 SEKBER GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

GOLKAR menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamakan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih

sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka SEKBER GOLKAR, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya GOLKAR dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru.

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan GOLKAR. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader GOLKAR. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap GOLKAR lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu GOLKAR yang berlambang beringin ini

selalu tampil sebagai pemegang. Kemenangan GOLKAR selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir.

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada GOLKAR. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka GOLKAR juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu GOLKAR dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR. Saat itu GOLKAR juga mengusung citra sebagai GOLKAR baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan GOLKAR dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum GOLKAR yang cukup legendaris.

Partai GOLKAR kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai GOLKAR mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada pemilu berikutnya GOLKAR kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 GOLKAR menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai GOLKAR kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa GOLKAR memenangkan pemilu. Dia menargetkan GOLKAR menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum GOLKAR dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)
2. Suprpto Sukowati (1969-1973)
3. Amir Moertono (1973-1983)
4. Sudharmono (1983-1988)
5. Wahono (1988-1993)
6. Harmoko (1993-1998)
7. Akbar Tandjung (1998-2004)
8. Jusuf Kalla (2004-2009)
9. Aburizal Bakrie (2009-sekarang)

## **B. Visi Partai Golongan Karya**

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai

GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berahlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLKAR hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

### C. Misi Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.



#### **D. Tujuan dan Fungsi Partai Golongan Karya (GOLKAR)**

Partai GOLKAR bertujuan :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Partai GOLKAR menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

## **E. Keanggotaan dan Sistem Kaderisasi Partai**

### a. Keanggotaan:

1. Anggota Partai GOLKAR adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GOLKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

### b. Sistem Kaderisasi:

Kader partai terdiri dari:

1. Kader Partai GOLKAR adalah Anggota Partai GOLKAR yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai;
2. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan

Kader dan disaring atas dasar kriteria :

1. Mental - Ideologi;
2. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai;
3. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT);
4. Kepemimpinan;
5. Militansi dan mandiri;

- c. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa; Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### **F. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)**

- a. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
  - 1. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
  - 2. Mengesahkan Komposisi Personalial Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
  - 3. Mengesahkan Komposisi dan Personalial Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban :
  - 1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah

dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;

2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi

### **G. Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban**

Struktur Organisasi Partai GOLKAR terdiri atas tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang masing-masing berturut-turut dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

#### **a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)**

Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif yang memiliki wewenang :

1. Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR mengesahkan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi
4. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Dewan Pimpinan Pusat selain memiliki wewenang juga memiliki kewajiban, kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi yang memiliki wewenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Daerah Provinsi memiliki kewajiban:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah Provinsi.

c. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Kecamatan.
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Kecamatan.

Sedangkan kewajiban dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pimpinan Kecamatan

Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan. Pimpinan Kecamatan memiliki wewenang:

1. Menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.
3. Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.
4. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

Pimpinan Kecamatan memiliki kewajiban yaitu :

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Kecamatan.

e. Pimpinan Desa/Kelurahan

Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain adalah Badan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan memiliki wewenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.

Sedangkan kewajiban Pimpinan Desa/Kelurahan adalah:

1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
2. Mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR.



3. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Desa/Kelurahan atau sebutan lain.

f. Badan dan Lembaga Partai GOLKAR

Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya Jenis Badan- badan yang dibentuk partai GOLKAR antara lain :

1. Badan penelitian dan pengembangan
2. Badan informasi dan komunikasi
3. Badan advokasi hukum, hak asasi manusia dan otonomi daerah
4. Badan pengembangan seni, budaya dan pariwisata

Sedangkan jenis – jenis lembaga yang dibentuk oleh partai GOLKAR yaitu:

1. Lembaga pengelola kaderisasi
2. Lembaga pelatihan profesi masyarakat (LPPM)
3. Lembaga pemenangan pemilu
4. Lembaga pengkajian dan pengembangan ekonomi dan usaha kecil menengah (UKM)

g. Organisasi Sayap Partai GOLKAR

Partai GOLKAR memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai. Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai.

h. Dewan Pertimbangan

Partai GOLKAR memiliki Dewan Pertimbangan yang berfungsi member saran, nasehat, dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai GOLKAR sesuai dengan tingkatannya. Dewan Pertimbangan memberi saran,

nasehat, dan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Ketua Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Kecamatan (Muscam), dan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muslur) melalui Tim Formatur. Susunan dan personalia Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan bersama Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

#### 1. Fraksi

Partai GOLKAR memiliki Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang komposisi dan personalianya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Fraksi adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai GOLKAR di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

## **H. Dinamika Konflik Partai GOLKAR**

Munaslub GOLKAR tahun 1998 berhasil melahirkan Paradigma Baru Partai Golkar dan Pemilu tahun 1999 telah menghantarkan Partai GOLKAR pada posisi yang istimewa. Tetapi, keberhasilan itu tidak terlepas dari konflik internal yang terjadi di tubuh Partai GOLKAR. Konflik internal Partai GOLKAR mulai muncul kepermukaan ketika Soeharto lengser dari kursi Presiden tahun 1998. Soeharto yang memimpin Indonesia selama 36 tahun secara otomatis menjadi Dewan Pimpinan (DP) Partai GOLKAR. Lengsernya Soeharto menyebabkan munculnya beberapa faksi yang menyatakan diri akan memimpin Partai GOLKAR. Akhirnya pada Munaslub tahun 1998 dimenangkan oleh faksi Harmoko (Suryadinata, 1992:97).

Dua bulan setelah Munaslub, perseteruan antara pihak yang kalah dengan pihak yang menang dalam Munaslub kembali terjadi. Kali ini pihak yang kalah memberikan nota keberatannya terhadap kepemimpinan Akbar Tandjung yang dianggapnya tidak mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan B.J Habibie. Dalam nota keberatan yang bertanggalkan 7 September 1998 itu, mereka juga mempertanyakan mengapa GOLKAR tidak melakukan pergantian unsur pimpinan MPR/DPR dari GOLKAR, yaitu Harmoko dan Abdul Gafur yang mereka nilai sebagai individu-individu yang negatif dan tidak cakap dalam politik (Nugroho, 1999: 194).

Konflik berikutnya di tubuh Partai Golkar berkenan dengan persiapan Partai GOLKAR memenangkan pemilihan presiden keempat. Pemicunya adalah pernyataan Marzuki Darusman yang menegaskan bahwa pencalonan B.J Habibie oleh Partai Golkar bukanlah pencalonan final melainkan suatu pencalonan optimal. Ini berarti bahwa pencalonan B.J Habibie memiliki kemungkinan untuk dibatalkan sambil melihat perkembangan politik baru. Padahal, sebelum pemilu dilaksanakan, Marzuki Darusman justru mengatakan bahwa B.J Habibie merupakan orang yang paling layak dicalonkan. Pernyataan tersebut tentu saja menyulut kegusaran di kalangan pendukung B.J Habibie yang ada dalam Partai Golkar. Mereka melancarkan protes kepada DPP Partai Golkar agar segera mencopot Marzuki Darusman dari posisinya sebagai salah seorang ketua partai (Jatmiko, 2010:76)

Perseteruan dua kelompok ini memasuki tahap kritis ketika B.J Habibie membacakan pertanggungjawaban di depan SU MPR tapi pertanggung jawaban ini ditolak. Ditolaknya laporan petanggungjawaban, otomatis peluang Habibie terpilih sebagai presiden keempat menjadi kecil, dan Habibie secara elegan memilih mundur dari pencalonan presiden setelah melihat kenyataan bahwa ia tidak mungkin lagi memenangkan posisi itu (Jatmiko, 2010:76).

Empat bulan setelah pernyataan pertanggungjawaban SU MPR, konflik kembali muncul berkenaan dengan rencana kubu pro-Habibie membuat partai sempalan yang diberi nama Partai Madani yang memiliki platform nasionalisme dan Negara kesatuan. Pencetus partai ini adalah sayap kelompok pro-Habibie, yaitu para aktivis ICMI yang dipimpin Jimly Asshidiqie bersama sejumlah aktivis politik Iramasuka, seperti Marwah Daud Ibrahim dengan tujuan mengembalikan Presiden B.J Habibie ke panggung politik nasional. Rencana kelompok pro-Habibie ini ditanggapi secara beragam oleh aktivis Partai Golkar. Akbar Tandjung sendiri melihat rencana itu sebagai hal yang biasa dan sudah terbiasa dengan manuver politik seperti itu. Akhirnya, rencana pembentukan partai baru itu pun mengalami stagnasi (Jatmiko, 2010:77)..

Partai GOLKAR kembali memanas ketika Rahardi Ramelan, mantan Kepala Bulog di bawah pemerintahan B.J Habibie, memberikan pernyataan di depan tim penyidik Kejaksaan Agung bahwa ia telah mengeluarkan dana sebesar 54,6 Miliar dalam rangka penanggulangan krisis pangan. Dari jumlah tersebut, 40 miliar ia serahkan kepada Akbar Tandjung yang ketika itu menjabat sebagai Mensesneg untuk program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS). Dua hari setelah pengakuan ini, Akbar Tandjung mengakui bahwa ia telah menerima cek dari Rahardi Ramelan, dan cek tersebut langsung diserahkan kepada sebuah yayasan untuk membantu mengatasi kerawanan pangan di masyarakat. Dua minggu berikutnya, Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan izin kepada

Kejaksaan Agung untuk memeriksa Akbar Tandjung sebagai saksi dan Akbar Tandjung divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena terbukti melakukan korupsi . Sebulan setelah Rapim pada bulan Februari tahun 2002, Akbar Tandjung resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung (Jatmiko, 2010:80).

Tahun 2014, perpecahan dalam tubuh internal Partai GOLKAR terjadi lagi setelah pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Sesuai dengan isi rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) GOLKAR di Pekanbaru, Riau, pada Oktober 2009, Munas partai Golkar akan digelar pada tahun 2015. Namun demikian Tim Presidium Penyelamat partai GOLKAR mendorong agar Munas digelar tahun 2014. Hal ini berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai bahwa Munas digelar setiap lima tahun. Berdasarkan pada bulan dan tahun pelaksanaan Munas, Munas berikutnya seharusnya digelar pada Oktober 2014. Dengan pertimbangan itu, Partai GOLKAR menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua Bali yang berlangsung pada tanggal 30 November - 3 Desember 2014. Akibatnya, terjadi perpecahan di tubuh Partai GOLKAR berbuntut panjang. Hasil Munas IX Golkar yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketum DPP 2014-2019 dan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Dianggap tidak sah oleh Tim Presidium. Lebih dari itu, Munas tersebut bahkan ditolak oleh Tim Presidium tersebut. Sejumlah tokoh tim Presidium tersebut ialah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin

Amali, Agus Gumiwang, Laurens Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, dan Zainal Bintang. Mereka menolak Munas tersebut karena bertentangan dengan hasil rapat pleno DPP Partai GOLKAR. Para tokoh tersebut didukung oleh tiga organisasi pendiri Golongan Karya (Tri Karya), yakni Kosgoro 1957, SOKSI, dan MKGR (Debora, 2014: 17).

Perpecahan Partai Golkar semakin meruncing karena Munas partai di Bali melakukan pemecatan terhadap 17 kader Partai Golkar yang dianggap tidak patuh pada keputusan partai. Pemecatan tersebut bahkan diikuti dengan pencabutan hak kepengurusan periode 2014-2019 dan penarikan keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI. Situasi ini semakin mendorong Tim Presidium untuk segera melakukan percepatan Munas dari yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2015 menjadi tanggal 6-8 Desember 2014 di Ancol Jakarta. Walaupun pelaksanaan yang dipercepat tidak sesuai dengan komitmen awal untuk mengikuti AD/ART partai, dalam upaya menghentikan perselisihan berlanjut, Munas tersebut akhirnya dimajukan (Debora, 2014: 18).

Adanya dua Munas ini menimbulkan dualisme kepengurusan, yaitu antara Kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol dan Kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali. Hal ini juga berdampak pada kepengurusan Partai GOLKAR di Daerah, khususnya di Provinsi Lampung.



## **I. Gambaran Umum DPD I Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Lampung**

DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.7B Pahoman, Bandar Lampung. Pada saat ini Provinsi Lampung memiliki 15 DPD Tingkat II yang berada di setian Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Saat ini, terjadi dualisme kepengurusan DPD I Provinsi Lampung. Maka pada gambaran umum DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung penulis akan memaparkan kepengurusan dari kedua kubu, yaitu :

### **1. Kepengurusan DPD I Kubu M. Alzier Dianis Thabranie.**

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR No:KEP/DPP/GOLKAR/IIV/2015 tanggal 8 April 2015 komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi Lampung memiliki 86 personalia dalam struktur organisasi partai. Komposisi personalia DPD I Partai GOLKAR terdiri dari Ketua DPD, Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Ketua Dan Wakil Ketua Bagian-Bagian serta Anggota Bagian.

DPD I Partai GOLKAR saat ini di pegang langsung oleh M. Alzier Dianis Thabranie sebagai Ketua DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP- 14/DPP/GOLKAR/IV/2015 tentang

Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Lampung dan Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung.

**Tabel 2. Daftar Komposisi Personalia DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung Kubu M. Alzier Dianis Thabranie.**

NO	NAMA	JABATAN
1	M. Alzier Dianis Thabranie, SE, SH	Ketua
2	Asep Yani	Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah
3	Dr. H. Yuria Putra Tubarad, M.Si	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
4	Ir. H. Indra S. Ismail, MM	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Wilayah
5	H. Achmad Junaidi Sunardi, SH	Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal
6	Drs. I Made Bagiasa	Wakil Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
7	Hj. Ririn Kuswantari S.Sos	Wakil Ketua Bidang Perempuan
8	H. Rycko Menoza SZP, SE, SH, MBA	Wakil Ketua Bidang Kepemudaan
9	Herwan Saleh, SE	Wakil Ketua Bidang Pelajar, Mahasiswa dan LSM
10	Taren Sembiring	Wakil Ketua Bidang Pekerja, Tani dan Nelayan
11	Nedi Haryandi, SH, MH	Wakil Ketua Bidang Kesra dan Kerawanan Sosial
12	Hj. Nuraini Efendi	Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UKMB
13	KH. M. Basyir, S.Pd.I	Wakil Ketua Bidang Keagamaan
14	M. Rosmala Dewi Anwar, SH, MH	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham
15	Himawan Ali Imron, S.Fil	Wakil Ketua Bidang Diklat Litbang dan Kajian
16	Hj. Fauzia Muhajir Utomo, SH	Wakil Ketua Bidang Seni Budaya
17	A. Rahman Rusli	Wakil Ketua Bidang Kerjasama dengan Ormas
18	Ir. H. Hasanudin Sagala	Wakil Ketua Bidang Energi dan SDM
19	H. Iberahim Bastari	Sekretaris
20	Bakdiana Kurnianti, SE	Wakil sekretaris
21	Supriadi Hamzah	Wakil sekretaris
22	Hj. Husmiyati Syohimin, SH	Wakil sekretaris

23	Suwondon Anwar WS, S.I.Kom	Wakil sekretaris
24	Muhidin, S.Sos	Wakil sekretaris
25	Ir. Fatmawati	Wakil sekretaris
26	Drs. Lahmuddin Kadir	Wakil sekretaris
27	Drs Achmad Hasan	Wakil sekretaris
28	Asep Kholis, S.Ag	Wakil sekretaris
29	Drs. H. Subadra Yani	Wakil sekretaris
30	Suryantina	Wakil sekretaris
31	Sefi Anggraini, SE	Bendahara
32	Dasril Yanto, S.Sos	Wakil Bendahara
33	H. M. Diza Noviandi, ST, M.Sc	Wakil Bendahara
34	Zainab Pertiwi	Wakil Bendahara
35	Lukse Tobing	Wakil Bendahara
36	Sukawari	Wakil Bendahara
37	Hj. Suharjinah	Wakil Bendahara
38	Richard Ardiyanto, STP	Wakil Bendahara
39	Faanzir Zarami, S.Ag	Ketua Biro Organisasi dan Daerah
40	Hendarto Nawawi	Anggota Biro Organisasi dan Daerah
41	Indra Caya	Anggota Biro Organisasi dan Daerah
42	Dhebuay Umpuse Hatang	Ketua Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
43	Djujun Djuansyah	Anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
44	Citra Dewi	Anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
45	H. Mas'ad Wahyudi, SE	Korpemwil Lampung I : Kab. Lampung Selatan
46	Drs. Samidar, MM	Korpemwil Lampung I : Kab. Tanggamus dan Pringsewu
47	Legio, BP, SH	Korpemwil Lampung I : Kota Bandar Lampung dan Kab. Pesawaran
48	Suminta, BA	Korpemwil Lampung II : Kab. Lampung Timur
49	H. Sabki	Korpemwil Lampung II : Kab. Tulang Bawang
50	H. Daryanto Dahliir, SE	Korpemwil Lampung II : Kab. Tulang Bawang Barat dan Kab. Mesuji
51	Drs. Rahmat kartolo	Korpemwil Lampung III : Kab. Way Kanan
52	Kartubi	Korpemwil Lampung III : Kab. Lampung Utara dan Kab. Lampung Barat
53	Drs. I Nyoman Suryana	Korpemwil Lampung III : Kab. Lampung Tengah
54	Nurlela	Korpemwil Lampung III : Kota Metro
55	Buchori Muzamil, SH	Ketua Biro Infokom dan Penggalangan Opini
56	Jaya Dikari	Anggota Biro Infokom dan Penggalangan Opini
57	Syahroni Yusuf	Anggota Biro Infokom dan Penggalangan Opini
58	Dra. Kusmawati	Ketua Biro Perempuan

59	Lusi Aprilia	Anggota Biro Perempuan
60	Dian Novita	Anggota Biro Perempuan
61	Selamat Rasyid	Ketua Biro Kepemudaan
62	M. Rasyid Nawawi	Anggota Biro Kepemudaan
63	Sulistiana	Anggota Biro Kepemudaan
64	Novriwan Ismail	Ketua Biro Pelajar, Mahasiswa dan LSM
65	Sudarmono Saputra	Anggota Biro Pelajar, Mahasiswa dan LSM
66	Muklis Wertha	Anggota Biro Pelajar, Mahasiswa dan LSM
67	Helida Heliyanti Syukri, SE	Ketua Biro Pekerja, Tani dan Nelayan
68	Hanu Kuncoro	Anggota Biro Pekerja, Tani dan Nelayan
69	Dani Suwira	Anggota Biro Pekerja, Tani dan Nelayan
70	Ayu Kartika Puspa, S.Kom, M.T	Ketua Biro UKM dan Besar
71	Siti Masitoh	Anggota Biro UKM dan Besar
72	R. Hendro Martono	Anggota Biro UKM dan Besar
73	Miraya Z. Besila, SH	Ketua Biro Koperasi
74	Kusmedi Salim, SE	Anggota Biro Koperasi
75	Helen Hitriani	Anggota Biro Koperasi
76	Iwan Zulfikar, SE	Ketua Biro Keagamaan dan Seni Budaya
77	Laila Wati	Anggota Biro Keagamaan dan Seni Budaya
78	H. Fachruddin Al Abidi, SH	Ketua Biro Kesra dan Kerawanan Sosial
79	Drs. Sayuti Zuhri	Anggota Biro Kesra dan Kerawanan Sosial
80	Fasni Bima	Anggota Biro Kesra dan Kerawanan Sosial
81	Wiliyus Prayietno, SH, MH	Ketua Biro Hukum dan HAM
82	Nazaruddin, SH	Anggota Biro Hukum dan HAM
83	Bambang Handoko, SH, MH	Anggota Biro Hukum dan HAM
84	Afdal, S.Pd.I	Ketua Biro Diklat, Litbang dan Kajian
85	Octavian Toro Dianto	Anggota Biro Diklat, Litbang dan Kajian
86	M. Riva'i	Anggota Biro Diklat, Litbang dan Kajian

(Sumber :Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR No: KEP-14/DPP/GOLKAR/IV/2015)

## 2. Kepengurusan DPD I Kubu Heru Sambodo

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya No : KEP-022/DPP/GOLKAR/III/2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Lampung bahwa Mahkamah Partai GOLKAR Provinsi di

seluruh Indonesia sudah berakhir masa baktinya, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan konsolidasi Partai GOLKAR untuk mewujudkan suatu organisasi yang kuat dan bersinergi dalam mencapai visi dan misi Partai GOLKAR.

DPD I Partai GOLKAR saat ini di pegang langsung oleh MW. Heru Sambodo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Nomor : KEP-022/DPP/GOLKAR/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Susunan dan Komposisi Pelaksanaan Tugas Pengurus DPD I Provinsi Lampung.

**Tabel 3. Daftar Komposisi Personalia DPD I Partai GOLKAR Provinsi Lampung Kubu MW. Heru Sambodo**

No	NAMA	JABATAN
1	MW. Heru Sambodo, ST, MH	Ketua
2	Pudji Ismail, ST,Bc.Ak	Wakil Ketua Bidang Organisasi
3	Irfan Balga, S.H	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
4	Ahmad Sibli	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
5	Sumarna, S.E	Wakil Ketua Bidang Kesra & Kerawanan Sosial
6	A.Rizky,S.H	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
7	Patra Rahman, S.E	Wakil Ketua Bidang Pekerja,Tani, dan Nelayan
8	Meliyawati, SE,MM	Wakil Ketua Bidang Koperasi
9	Khani Surya Jaya	Wakil Ketua Bidang UKM dan Besar
10	Shadli Komara, S.Pd	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Seni Budaya
11	Erlin Sofana, ST	Wakil Ketua Bidang Diklat Litbang dan Kajian
12	Husna Purnama, S.E, MEP	Wakil Ketua Bidang Perempuan
13	M. Natsir, S.Pd	Wakil Ketua Bidang Keagamaan
14	Soni Eriko, S.Sos	Wakil Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini

15	Ersontowi, M.Pd	Sekretaris
16	M.Luthfie, AS	Wakil sekretaris Bidang Organisasi
17	M. Ariyansyah	Wakil sekretaris Bidang Kaderisasi dan keanggotaan
18	Ismaluddin Yunus, S.E	Wakil sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu
19	Nurhasanah Nanda Lestari, S.H	Wakil sekretaris Bidang Kesra & Kerawanan Sosial
20	Wahyu Widyatmiko,S.H	Wakil sekretaris Bidang Hukum dan HAM
21	Dra.Hj.Mintarsih Yusuf	Wakil sekretaris Bidang Pekerja,Tani, dan Nelayan
22	M.Syukri Nawawi, S.T	Wakil sekretaris Bidang Koperasi
23	Afri Ichwansyah	Wakil sekretaris Bidang UKM dan Besar
24	Hengki A. Jajuli	Wakil sekretaris Bidang Pemuda dan Seni Budaya
25	Sugiyanto, S.Pd	Wakil sekretaris Bidang Diklat Litbang dan Kajian
26	Destiyanti Puspita Dewi,SE	Wakil sekretaris Bidang Perempuan
27	Lucki Ariyandi,S.Sos	Wakil sekretaris Bidang Keagamaan
28	R.Nur Syamsu,SE	Wakil sekretaris Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
29	Iwan Irawan	Bendahara
30	M.Nizar Rochman, S.Ag	Wakil Bendahara
31	Nahwan Taufik,SE	Wakil Bendahara
32	Iwan Nuryadi,S.Sos	Wakil Bendahara
33	Dalela Noor	Wakil Bendahara
34	Esti Efriyana, ST	Wakil Bendahara
35	RA.Luthfie, BBA	Wakil Bendahara
36	Doni Indra Saputra	Wakil Bendahara
37	Marvin Perangin angin	Wakil Bendahara
38	Hi.Rusdan, SH	Wakil Bendahara
39	Anton Parjiyo	Wakil Bendahara
40	Mulyadi,S.H,M.H	Ketua Bagian Organisasi
41	Fitriani	Anggota Bagian Organisasi
42	Broto Sisworo,SE	Anggota Bagian Organisasi
43	Budiono	Ketua Bagian Kader
44	Roby Aswan	Anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
45	Nurbaiti, S.E	Anggota Biro Kaderisasi dan Keanggotaan
46	Drs. Slamet Riyadi	Ketua Bagian Pemenangan Pemilu
47	Martha Ardiansyah,SE	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
48	Rachmat Husein, D.C	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
49	Heny Baharuddin	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
50	Wan Harry	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
51	Ir.Ade Kurniawan	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
52	Kasyiono	Ketua Bagian Kesra dan Kerawanan Sosial

53	Margas Azril	Anggota Bagian Kesra dan Kerawanan Sosial
54	Suranto	Bagian Kesra dan Kerawanan Sosial
55	Khusairi,SH	Ketua Bagian Hukum dan HAM
56	Basuki,SH	Anggota Bagian Hukum dan HAM
57	Syahrul Hafizh	Anggota Bagian Hukum dan HAM
58	Edisyah,SH	Ketua Bagian Pekerja, Tanidan Nelayan
59	Talen	Anggota Bagian Pekerja, Tanidan Nelayan
60	Rahmasari Budi	Bagian Pekerja, Tanidan Nelayan
61	Drs.Gunawan	Ketua Bagian Koperasi
62	Rahmalani Yonika	Anggota Bagian Koperasi
63	Ariyanto Lahab	Anggota Bagian Koperasi
64	Ishak Yatim	Ketua Bagian UKM dan Besar
65	A. Suhaimi,S.Pd	Anggota Bagian UKM dan Besar
66	Heri Wibisono	Anggota Bagian UKM dan Besar
67	Haryanto	Ketua Bagian Pemuda dan Seni Budaya
68	M. Ikromi	Anggota Bagian Pemuda dan Seni Budaya
69	Agustian	Anggota Bagian Pemuda dan Seni Budaya
70	Barkhatillah Desvitasari,SE	Ketua Bagian Diklat, Litbang &Kajian
71	Erwin Oktavianto	Anggota Bagian Diklat, Litbang &Kajian
72	Toni Khairul Hakim	Anggota Bagian Diklat, Litbang &Kajian
73	Sinta Wulan	Ketua Bagian Perempuan
74	Sri Agustina	Anggota Bagian Perempuan
75	Siti Kurniasari	Anggota Bagian Perempuan
76	Wasil Al-Amin,SE	Ketua Bagian Keagamaan
77	Hikmat Gunasah	Anggota Bagian Keagamaan
78	Hj. Nilawati Hasan	Ketua Bagian Keagamaan
79	Nurjanah	Anggota Bagian Keagamaan
80	Asman Mansyur	Ketua Bagian Infokom dan Penggalangan Opini
81	Tri Yoga Stansa	Anggota Bagian Infokom dan Penggalangan Opini
82	Nasroni,A.Md	Anggota Bagian Infokom dan Penggalangan Opini

(Sumber Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Lampung No: KEP-11/DPDPG-I/LPG/IV/2012)